

ABSTRAK

Tingginya pelanggaran lalu lintas berimbas pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Tidak sedikit peristiwa kecelakaan disebabkan karena tidak mengindahkan etika berkendara. Buruknya tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dapat menjadi indikator kurangnya efektivitas penegakan hukum. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah solusi digital mengatasi hambatan penerapan UU LLAJ dengan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mekanisme *ETLE* di Indonesia, serta implementasi penegakan hukum berbasis teknologi informasi terhadap penggunaan *ETLE* oleh lembaga kepolisian, termasuk hambatan dan solusinya dalam pengimplementasiannya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian yang didapatkan ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Berbasis Sistem Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan pengaturan *ETLE* saat ini. Adapun jenis-jenis *AI* yang digunakan pada mekanisme *ETLE* secara umum diantaranya: *ETLE* statis, *mobile*, portabel dan *drone*. Di jalan tol, *ETLE* dengan sensor *WIM* digunakan untuk mengatasi truk *ODOL*. Penegakan hukum *ETLE* dinaungi oleh bagian Ditgakkum Subdit Dakgar, yang berhasil meningkatkan penindakan sebesar 35,7% pada 2023. Tahun 2024 teknologi *Face Recognition* akan diterapkan untuk menegakkan hukum yang lebih efektif. Penggunaan berbagai jenis *ETLE* di masing-masing wilayah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hambatan penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dimulai dari keterbatasan dalam mendeteksi pelanggaran dan area yang belum tersentuh *ETLE*, serta anggaran infrastruktur yang masih kurang memadai. Penegakan hukum oleh kepolisian harus mematuhi aturan lalu lintas, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Diperlukan inovasi dengan menambah jenis pelanggaran sesuai UU LLAJ pada penggunaan kamera *ETLE* untuk menangani pelanggaran yang belum dapat dideteksi. Terakhir, dibutuhkan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam pengadaan *ETLE* guna mempercepat penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: *ETLE*, Penegakan Hukum, Kepolisian.